

EFEKTIVITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS

Engkus^{1*)}, Auliyatu Zahra¹⁾, Azra Januarti Yusmi¹⁾, Disa Maulida
Insani¹⁾

UIN Sunan Gunung Djati Bandung¹⁾
Email : engkus@uinsgd.ac.id^{1*)}

Abstract

One of the mechanisms developed by the government to assist the implementation of good governance is SAKIP. The successful implementation of SAKIP shows how successful and efficient the government is in achieving good governance. One government agency that has implemented SAKIP is the Diskominfo service in Ciamisa Regency. The purpose of this study was to assess the performance of Sakip or the Performance Accountability System for Ciamis Regency Government Agencies. Data collection methods for this study include a descriptive descriptive approach and library research. Based on the findings of the study, SAKIP has been implemented in a more complete, consistent and successful manner within the Ciamis District Communication and Information Service every year. However, the main efforts of the Ciamis Regency Diskominfo are still not supported by adequate facilities and infrastructure. In addition, improving human resource standards that can improve the performance of the Ciamis Regency Diskominfo also needs to be improved.

Keywords: Government Agency Performance Monitoring System, Effectiveness, Communication, Information Services

Abstrak

Salah satu mekanisme yang dikembangkan pemerintah untuk membantu pelaksanaan *good governance* adalah SAKIP. Keberhasilan implementasi SAKIP menunjukkan betapa sukses dan efisiennya pemerintah mencapai *good governance*. Salah satu instansi pemerintah yang telah menerapkan SAKIP adalah layanan Diskominfo di Kabupaten Ciamisa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis. Metode pengumpulan data untuk penelitian ini meliputi pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kepustakaan. Berdasarkan temuan studi tersebut, SAKIP telah dilaksanakan secara lengkap, konsisten, dan sukses di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis setiap tahunnya. Namun upaya berkelanjutan Diskominfo Kabupaten Ciamis masih belum didukung sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, peningkatan standar sumber daya manusia yang dapat menunjang kinerja Diskominfo Kabupaten Ciamis juga perlu ditingkatkan.

Kata Kunci: Sistem Pemantauan Kinerja Instansi Pemerintah, Efektivitas, Komunikasi, Layanan Informasi

A. PENDAHULUAN

Salah satu cara yang dikembangkan pemerintah untuk membantu terwujudnya *good governance* adalah adanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Keberhasilan penerapan SAKIP menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah untuk mencapai *good governance*. Akuntabilitas kinerja yang meningkat, transparansi penggunaan anggaran dan laporan program, serta tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan tanda-tanda terwujudnya *good governance*. Menurut Tatikonda dalam (Christy, et al. 2017) pengukuran kinerja menunjukkan seberapa berhasil suatu kinerja telah dilakukan dengan biaya, waktu, dan kualitas sebaik mungkin. Ini juga menampilkan filosofi dan budaya organisasi.

Kebijakan akuntabilitas di Indonesia sendiri dimulai pada tahun 1998 sebagai hasil dari paradigma *good governance* Bank Dunia dan UNDP (*United Nations Development Programme*), yang memasukkan akuntabilitas sebagai salah satu prinsipnya (Nani, et al. 2021). Hal ini diikuti dengan terbitnya regulasi-regulasi terkait baik akuntabilitas keuangan maupun kinerja, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mengatur khusus tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja sangat penting untuk mencapai pemerintahan yang efektif dalam kaitannya dengan organisasi pemerintah yang dapat menjawab bagaimana anggaran negara digunakan untuk memberikan layanan publik sebaik mungkin.

Dalam kerangka akuntabilitas kinerja, kini perhatian administrasi birokrasi telah berkembang dari perspektif yang semula berorientasi pada pekerjaan (*output*) menjadi perspektif yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Pemerintah terlebih dahulu harus menetapkan *outcome* yang jelas berupa syarat-syarat yang harus dipenuhi dan memilih indikator-indikator keberhasilan kinerja yang terukur dan relevan agar tercipta akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik dan berorientasi pada hasil.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ciamis sendiri merupakan salah satu lembaga pemerintah yang telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Diskominfo adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang bertanggung jawab dalam mendukung Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian, statistik, dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati (Purnama, 2022). Dalam hal penyampaian informasi publik, Diskominfo memiliki peranan sangat penting dalam memajukan kesejahteraan rakyat Ciamis.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) juga memiliki peran penting dalam menyediakan layanan komunikasi dan informasi kepada masyarakat. Diskominfo bertanggung jawab untuk memastikan bahwa akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi masyarakat merata, serta memberikan informasi yang akurat dan terkini. Adanya penerapan SAKIP pada Diskominfo diharapkan dapat meningkatkan pemerataan informasi, komunikasi, dan transparansi kepada masyarakat. Selain menerapkan SAKIP, Diskominfo juga memiliki kewajiban melaporkan anggaran dan pertanggungjawaban kinerja tahunan yang dituangkan dalam LAKIP. Sehingga Diskominfo sendiri ataupun Bupati akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk mencari solusi atas kesulitan yang ada saat ini.

Dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi kepada publik maka Diskominfo Kabupaten Ciamis dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019-2024, menjabarkan komitmennya yang tertulis dalam sasaran misi ke satu yakni mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu dalam Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Ciamis 2019-2024 dalam LAKIP

disebutkan bahwa salah satu sasaran strategis Diskominfo 2019-2024 yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang pernah dilakukan oleh (Mukaromah & Priyono, 2021). dengan judul “Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang” dimana efektivitas diukur menggunakan pendekatan tujuan. Pendekatan berdasarkan tujuan menekankan pada pentingnya pencapaian tujuan atau sasaran sebagai kriteria dalam penilaian keefektifan.

B. KAJIAN PUSTAKA

a. Konsep Efektivitas

Efektivitas menurut Echols, (2022) Efektivitas secara etimologis berasal dari kata *effect* yang juga berarti efektif menurut kamus bahasa Inggris-Indonesia. Efektivitas, menurut (Mardiasmo, 2016), adalah ukuran seberapa baik suatu organisasi mencapai tujuannya. Jika rangkaian operasi menghasilkan pencapaian maksud dan tujuan akhir kebijakan, kegiatan operasional dikatakan efektif. Agar efektif, tujuan dan sasaran kebijakan harus dipenuhi. Suatu organisasi dianggap beroperasi secara efektif jika berhasil mencapai tujuannya. Jumlah uang yang dihabiskan untuk mencapai tujuan atau target kebijakan tidak terkait dengan konteks kemanjuran.

b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja terintegrasi melalui SAKIP, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. sedemikian rupa sehingga mereka bekerja sama untuk menerapkan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam situasi ini, setiap entitas wajib untuk melacak semua penggunaan dana negara dan mematuhi semua undang-undang yang berlaku. yang merangkum seberapa baik melaksanakan proyek dengan inisiatif yang didukung.

Indikator digunakan untuk menilai seberapa baik kinerja SAKIP dalam mendorong akuntabilitas daerah, sesuai dengan kriteria yang diajukan Duncan (Nani, et al., 2021), yang menyatakan bahwa langkah-langkah berikut efektif: 1) Pencapaian Tujuan: Setiap usaha untuk mencapai suatu tujuan harus dilihat sebagai suatu proses. Tahapan diperlukan untuk menjamin bahwa tujuan akhir akan tercapai. Sasaran dicapai dengan beberapa hal, termasuk: kerangka waktu dan target yang ditetapkan; 2) Integrasi, yang melibatkan penilaian kapasitas organisasi untuk berinteraksi, mencapai kesepakatan, dan berkomunikasi dengan banyak organisasi lain. Integrasi berkaitan dengan teknik dan metode bersosialisasi.; 3) Adaptasi mengacu pada kapasitas organisasi untuk berubah dalam menanggapi lingkungannya. Untuk tujuan ini, standar infrastruktur dan peningkatan kapasitas diterapkan. Hasibuan (Br, et al. 2022) mencantumkan berbagai penanda efektivitas kerja. Efektivitas adalah pencapaian bisnis yang meningkatkan produktivitas staf di dalam perusahaan. Persyaratan untuk pengaruh struktur organisasi dalam rangka meningkatkan tingkat sumber daya manusia dan meningkatkan hasil kerja dari segi kuantitas, kualitas, dan efisiensi.

Serangkaian metode, teknik, dan alat yang sistematis yang disebut SAKIP dimaksudkan untuk keperluan pencatatan serta perbandingan, pemungutan, klarifikasi, pelaporan dan meringkas kinerja di dinas. SAKIP diimplementasikan Menurut perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan kompilasi sistematis dari beberapa inisiatif, alat, dan proses untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. terdiri dari strategi strategis berikut, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja adalah

empat yang pertama. Penilaian dan Peninjauan Kinerja. Dalam konteks tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi, keenam komponen tersebut bekerja sama sebagai satu kesatuan. Melalui pertanggungjawaban yang sistematis atas kinerja berbagai kegiatan, alat, dan prosedur yang dibuat sesuai dengan tujuan akan menetapkan dan menghitung, mengklarifikasi, menyimpulkan, berupaya memajukan terciptanya mewujudkan pemerintahan untuk jujur dan amanah.

Tujuan diberlakukannya ini adalah untuk menghasilkan laporan kinerja yang kredibel. Petunjuk teknis pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Akuntabilitas pada hakekatnya mengacu pada tanggung jawab individu atau unit organisasi untuk mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam lingkup kerangka tujuan slogan yang dibentuk melalui akuntabilitas media dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja yang berulang.

Pengertian nilai evaluasi kinerja akuntabilitas merepresentasikan sejauh mana instansi pemerintah bertanggung jawab atas buatan bagi semua pengguna kewenangan. Pentingnya pertanggungjawaban kinerja mengungkapkan kompetensi organisasi pemerintahan.

c. Dinas Komunikasi dan Informatika

Berikut merupakan tanggung jawab dan fungsi Diskominfo:

1. Tanggung jawab

Bupati mendapat bantuan dari instansi yang dalam menjalankan tugas kedinasan pada aspek persandian, statistik, dan komunikasi.

2. Tujuan

Diskominfo melaksanakan tugas dalam melaksanakan kewajibannya sebagai berikut: 1) pembuatan petunjuk teknis khusus lapangan pengkodean, statistik; 2) Melaksanakan prakarsa peningkatan pelayanan publik, statistika; 3) Penerapan perkara dinas prakarsa pelayanan publik; 4) Pengembangan koding, statistik, dan informatika; 5) Penyusunan pedoman penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan TI; 6) Menerapkan manajemen informasi dan komunikasi; 7) Layanan permintaan informasi sesuai dengan persyaratan hukum untuk pencantuman; 8) Pembentukan penegakan sistem teknologi informasi untuk dinas; 9) bantuan informasi kawasan Mendeskripsikan keamanan informasi dan informasi password. Koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis persandian dan telekomunikasi; membantu sekretariat Diskominfo dalam memantau, menilai, dan melaporkan, statistik, dan pengkodean, dengan menyelesaikan pekerjaan tambahan adapun diberikan oleh Bupati sesuai dengan perintah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut (Mukhtar & Pd, 2013). Metode deskriptif kualitatif penelitian adalah teknik yang digunakan peneliti untuk memahami pengetahuan atau teori yang mendasari metodologi yang digunakan pada waktu tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali topik-topik baru untuk mengkaji masalah-masalah yang kompleks, yang juga dapat digunakan untuk mendalami masalah-masalah yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk menjaring informasi akurat mengenai efektifitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis.

Dalam teknik penelitian ini mengambil data dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dengan mengambil dari berbagai sumber dan referensi yang relevan berupa buku, jurnal dan hasil penelitian, dokumen yang digunakan untuk disesuaikan dengan kebutuhan agar bisa bantu dalam menjawab pertanyaan peneliti mengenai efektivitas Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Ciamis.

Menurut Ida Bagoes Mantra (Puspasari, 2016) Peneliti berperan secara mendalam sebagai pengumpul data utama dalam kualitatif penelitian, karena penelitilah memahami data tentang objek yang diteliti. validasi yang dilakukan oleh peneliti yakni evaluasi diri mengenai suatu pemahaman tentang teori efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk memahami wawasan yang diteliti tersebut. dengan menggunakan pemahaman deskriptif kualitatif.

Dalam proses analisisnya peneliti menggunakan teori; 1). kumpulan data, 2). reduksi suatu data, 3). data penyajian, 4). kesimpulan. teori yang di ambil dari dari Miles & Huberman (Saleh, 2017).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian ini dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Diskominfo sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki fungsi dan tata kerja unsur organisasi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Ciamis No 49 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Puspasari). , 2016). Hukum dasar yang menyempurnakan pelaksanaan pelaporan SAKIP dan LAKIP di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis, dalam peraturan Presiden Republik Indonesia No 29 tahun 2014 yang berisikan tentang SAKIP dan juga dapat dikemukakan bahwsannya kinerja instansi pemerintah merupakan suatu pertanggungjawaban dan perwujudan yang diwajibkan untuk keberhasilan/ kegagalan pada setiap kegiatan yang ada, dan juga untuk pemangku yang berkaitan dengan kepentingan misi organisasi dapat teratur sesuai dengan target kinerja yang dirumuskan dari laporan kinerja secara berskala/ berperiodik.

Adanya peraturan perundang-undangan terbaru untuk mendukung pelaporan SAKIP dan LAKIP, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Peraturan sebagai Dasar Tunjangan Kinerja dan Pengembangan Kompensasi, dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Persetujuan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Peninjauan Kembali Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diulangi dan dicabut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang sebelumnya menjadi landasan utama pelaksanaan SAKIP bagi Pemerintah Indonesia. Akibatnya, mulai tahun 2014,

Dalam (Mukaromah & Priyono, 2021)) dijelaskan bahwa Laporan kinerja tahunan dalam bentuk LAKIP pelaporan kemampuan beban bermaksud melaporkan bertujuan untuk lembaga tersebut. Peraturan PAN & RB No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah mengatur hal tersebut.

Selain itu LAKIP berfungsi sebagai penjelasan secara ringkas mengenai pencapaian kinerja yang tersusun berdasarkan perencanaan kegiatan kerja yang sebelumnya telah ditetapkan untuk pelaksanaan APBN/APBD Perpres No. 29 Tahun 2014. Seperti penjelasan awal dalam latar belakang penelitian ini merujuk pada penelitian yang pernah dilakukan oleh (Mukaromah & Priyono, 2021) dengan judul “Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang” dalam penelitian tersebut efektivitas diukur menggunakan pendekatan tujuan. Begitupun dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan tujuan untuk menganalisis efektivitas SAKIP di Diskominfo Kabupaten Ciamis.

Untuk mengukur Efektivitas SAKIP di Diskominfo Kabupaten Ciamis maka hal pertama yang perlu dilihat adalah bagaimana pelaksanaan SAKIP di Diskominfo itu sendiri. Jika

SAKIP tersebut berjalan sesuai dengan tujuan dibuatnya SAKIP maka dapat dikatakan SAKIP telah berjalan dengan efektif di Dinas Komunikasi dan Informatika. Namun, jika setelah dilaksanakan kegiatan atau program kebijakan publik ternyata hasilnya tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat, maka kebijakan tersebut dianggap tidak berhasil. Namun, terkadang dampak dari kebijakan publik tidak dapat dilihat secara instan, melainkan mungkin memerlukan proses tertentu untuk mencapai dampak yang diinginkan.

Untuk mengukur efektivitas dalam penelitian tentang efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis, maka peneliti mengukur berdasarkan tujuan dibentuknya SAKIP yang merujuk pada pedoman SAKIP dalam Lembaga Administrasi Publik (LAN) tahun 2010 (Puspasari, 2016). dimana tujuan SAKIP adalah : 1) Sumber daya utama untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam hal tugas, pembangunan, dan pelayanan pemerintah; 2) Metode efektif untuk memandu para pemimpin di seluruh jajaran pemerintahan agar dapat meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip good governance dan fungsi manajemen modern dengan taat asas; 3) Pendekatan terbaik untuk mengarahkan pengelolaan dana dan sumber daya lainnya agar berjalan efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang dapat diukur dan berkelanjutan; 4) Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan setiap pimpinan di Pemerintahan Republik Indonesia dalam melaksanakan Misi, Target, dan Tujuan Strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan.; 5) Sarana untuk mendorong upaya penyempurnaan organisasi, kebijakan publik, sistem perencanaan dan penganggaran, tata kelola, metode kerja, prosedur pelayanan kepada masyarakat, tahapan pelaporan, serta mencegah praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; 6) Alat untuk memotivasi karyawan di lingkungan Pemerintahan Republik Indonesia agar lebih kreatif, produktif, sensitif, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan jabatan sesuai dengan aturan, kebijakan, prosedur, dan tata kerja yang telah ditetapkan. Adapun faktor ekologi masih menjadi masalah dalam penyelenggaraan administrasi publik, paling tidak ada 5 (lima) faktor ekologi yaitu; 1) ekonomi; 2) struktur sosial; 3) jaringan komunikasi; 4) pola ideologi/symbol, dan; 5) sistem politik. Hal ini diduga karena kelima faktor tersebut belum dilakukan secara optimal (Engkus, 2017).

Berdasarkan hasil analisis dalam LAKIP dengan berpedoman pada tujuan SAKIP diatas, maka berikut merupakan hasil analisisnya:

1. SAKIP ini dinilai dapat meningkatkan adopsi birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika, dibuktikan dengan LAKIP Diskominfo Kabupaten Ciamis tahun 2022, dimana indikator periklanan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan kestabilan peningkatan sesuai dengan target kinerja. Salah satu contoh bagaimana hampir semua target telah terpenuhi adalah tujuan tinjauan SPBEE dari tahun 2021 hingga 2022. Komponen strategi perencanaan dari indikasi indeks telah diturunkan berdasarkan target. Namun memiliki nilai yang sesuai dengan pencapaian indikator-indikator tersebut, sehingga akan terus direalisasikan mulai tahun 2021. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa lampiran evaluasi SPBE Tahun 2021 telah memuat penjelasan masing-masing indikator. Sasaran strategis untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur daerah dan meningkatkan pelayanan publik tidak dapat dicapai dengan pencapaian hampir 100%. Kualitas laporan keuangan tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan target namun meningkat dibandingkan dengan hasil tahun sebelumnya sehingga diperoleh kesimpulan bahwa pencapaian target non-urusan telah tercapai sebesar 100%.
2. Program SAKIP Diskominfo Kabupaten Ciamis merupakan instrumen yang berguna untuk menegakkan disiplin di antara semua pimpinan di dinas ini dalam menggunakan dasar-dasar tata pemerintahan yang baik dan teknik manajemen kontemporer secara

ARTIKEL

bermoral. Indikator pencapaian dari tahun 2021 hingga 2022 yang menunjukkan peningkatan elastisitas sesuai dengan sasaran kinerja menunjukkan hal tersebut. Sasaran Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Untuk indeks aspek perencanaan strategis misalnya, hampir semua target pencapaian 100% indikator mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022 dari segi target, namun memiliki nilai tetap terhadap pencapaian indikator tersebut, sehingga indikator tersebut adalah secara riil masih tercapai mulai tahun 2021. Dengan demikian, bisa dikatakan target pencapaian evaluasi SPBE 2022 bisa dibilang 100%.

Gambar. 1 Realisasi Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun Sebelumnya dan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi Capaian Indikator 2021	Persentase Capaian Indikator 2021	Target 2022	Realisasi Capaian Indikator 2022	Persentase Capaian Indikator 2022
		Kuangan						
6	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	IKM Diskominfo	84	85.31	101.56 %	84.50	91.43	108.20 %

Sumber: LAKIP Kab. Ciamis (Diskominfo, 2022)

3. Dengan menggunakan SAKIP, Diskominfo bertujuan agar pengelolaan biaya dan bentuk sumber daya lainnya menjadi efisien dan efektif. sehingga hal tersebut menghasilkan indeks pencapaian pelayanan publik berbasis elektronik pada dinas komunikasi dan informatika tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2022 masih mengalami konsistensi dimana peningkatannya sesuai dengan target.
4. Dengan diterapkannya SAKIP, pelaporan terkait pertanggung jawaban akuntabilitas kinerja atau yang dikenal dengan LAKIP secara otomatis disajikan setiap akhir tahun. Sehingga setiap kinerja dapat terawasi dengan baik, hal ini dapat dilihat pada indeks pencapaian penerapan manajemen SPBE pada tahun sebelumnya sampai tahun 2022 ini konsisten dalam peningkatan dan keberhasilan dalam misi dan target, aspek audit TIK juga mengalami peningkatan pada target dari tahun sebelumnya sampai tahun 2022.
5. Dengan menerapkan SAKIP ini, Dinas Komunikasi dan Informatika didorong untuk bekerja dalam penyempurnaan organisasi, kebijakan publik, sistem perencanaan dan penganggaran, manajemen, teknik dan prosedur kerja pelayanan masyarakat, dan mekanisme pelaporan. Hal ini dapat dilihat dari grafik di bawah ini yang memperlihatkan capaian kinerja hasil Evaluasi SPBE dari tahun ke tahun yang mengalami konsistensi dengan persentase rata-rata 100% di Diskominfo Kabupaten Ciamis:

Gambar 2. Grafik capaian target Evaluasi SPBE Urusan Kominfo, Urusan Statistik dan



Persandian Tahun 2021-2022

Sumber: LAKIP Kab. Ciamis (Diskominfo, 2022)

Walau masih dengan berbagai keterbatasan seperti SDM dan kurang memadainya sarana dan prasana, namun Diskominfo tetapi mencoba untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dari tahun ketahun agar semua akses peleyanan dan dokumen-dokumen menjadi lebih baik.

6. Dengan adanya SAKIP juga tentunya mendorong kreativitas, produktivitas, sensitivitas, disiplin dan tanggung jawab para pegawai di lingkungan Diskominfo Kabupaten Ciamis. Namun dalam LAKIP Diskominfo Kabupaten Ciamis disebutkan bahwa permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022 yang perlu mendapat perhatian antara lain : 1) Peningkatan koordinasi antar SKPD yang menggunakan Data Statistik baik dalam perencanaan maupun evaluasi; 2) Perlunya koordinasi antar SKPD dalam mengirimkan data website Kabupaten Ciamis sehingga data yang ditampilkan selalu data terbaru / terkini; 3) Peningkatan sarana dan prasarana; dan 4) Peningkatan kualitas SDM dengan mengikutsertakan bimtek pegawai agar dapat tersertifikasi pada bidang masing-masing.

E. SIMPULAN

Dapat diketahui bahwasannya berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka adanya SAKIP di Diskominfo Kabupaten Ciamis berjalan sesuai dengan tujuan dibuatnya SAKIP, dan dapat dikatakan pula SAKIP telah berjalan dengan cukup efektif di Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan pada hasil penelitian juga dapat disimpulkan bahwa efektivitas dari pelaksanaan SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis setiap tahun mengalami konsistensi dan juga peningkatan, hal ini dapat dilihat dari program kerja yang telah dilaksanakan. Tetapi, masih didapati kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung berjalannya kinerja di Diskominfo Kabupaten Ciamis. Selain itu diperlukan pula peningkatan kualitas SDM yang mampu mendukung berjalannya kinerja Diskominfo Kabupaten Ciamis.

Maka rekomendasi yang dapat kami berikan pada Diskominfo Kabupaten Ciamis diantaranya yaitu: 1). Memfokuskan anggaran yang dirancang untuk peningkatan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kinerja para pegawai di Diskominfo Kabupaten Ciamis; 2). memberikan dan mengadakan pelatihan bagi para pegawai secara berkelanjutan sesuai dengan bidangnya masing-masing agar para pegawai dapat tersertifikasi dan memiliki kemampuan yang memadai; 3). meningkatkan koordinasi dari setiap SKPD dalam hal pemberian data dan informasi pembangunan sesuai bidang tugas dan kewenangan SKPD terkait, agar berita yang dimuat pada website resmi Kabupaten Ciamis data yang disajikan selalu terbaru, peningkatan koordinasi ini dengan cara memilih seseorang coordinator yang memang kompeten dan bertanggung jawab terhadap setiap tugas yang diberikan.

Penelitian ini merupakan upaya yang dilakukan peneliti untuk memberikan informasi mengenai efektivitas SAKIP di Diskominfo Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, diharapkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menerapkan SAKIP dalam setiap kinerja yang dilakukan agar dapat mencapai *good governance* ataupun pemerintahan yang baik. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat lebih melengkapi data-data untuk mendukung penelitian yang serupa dan tidak hanya bersumber dari LAKIP saja, agar data yang disajikan lebih lengkap dan terstruktur. Peneliti juga dapat menganalisis dengan berfokus kepada satu tahun saja agar yang dianalisis lebih fokus kepada evaluasi satu tahun kinerja dari SAKIP itu sendiri namun tetap melihat dan mengevaluasi dari capaian-capaian kinerja sebelumnya.

Selain itu dapat dipaparkan kembali setiap komponen-komponen efektivitas SAKIP beserta tujuannya agar pembaca dapat mengetahui secara lebih jelas dan terstruktur.

REFERENSI

- Br, A. M. M., Madani, M., & Tahir, N. (2022). Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(4), 1173–1180.
- Christy, Y., Setiana, S., & Cintia, P. (2017). Efektivitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Studi Kasus pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Bagian Umum dan Perlengkapan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik). *Jurnal Akuntansi*, 9(2).
- Echols, J. M. (2022). *Kamus inggris indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Engkus, E. (2017). Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(1), 91–101.
- Mardiasmo, M. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mukaromah, R., & Priyono, N. (2021). Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang. *Economic and Education Journal (Ecoducation)*, 3(1), 89–99.
- Mukhtar, P. D., & Pd, M. (2013). Metode praktis penelitian deskriptif kualitatif. *Jakarta: GP Press Group*.
- Nani, F. L., Rowa, H., & Martini, A. (2021). Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 6(1), 102–111.
- Purnama, R. (2022). *Implementasi Kebijakan Tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Oleh Pegawai Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis*.
- Puspasari, E. (2016). Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kependudukan Danpendaftaran Sipil Kabupatenpurworejo. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 5(4).
- Saleh, S. (2017). *Analisis data kualitatif*. Pustaka Ramadhan, Bandung.